

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara tersebut adalah terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan Indonesia yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Reformasi tersebut masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dapat semakin diwujudkan.

Salah satunya diwujudkan dengan laporan keuangan negara. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya pada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintahan dijelaskan bahwa laporan

keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik; relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Standar akuntansi pemerintah merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintah yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan keuangan sangat penting dalam suatu instansi pemerintahan atau organisasi tertentu karena dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan suatu keberhasilan instansi tersebut. Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2007: 11). Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan adalah untuk dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan juga dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan instansi sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang handal dan dapat dipercaya. Untuk itu, laporan keuangan yang dibuat hendaknya harus berkualitas dan mudah dipahami sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta

secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan kualitas dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kurangnya kualitas laporan keuangan sering menjadi permasalahan dalam suatu instansi tertentu termasuk pada pemerintah daerah di Indonesia yaitu pada SKPD masing-masing daerah di Indonesia. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Agar dapat memenuhi karakteristik laporan keuangan tersebut maka SKPD harus dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan pada SKPD maka akan lebih mudah dalam menentukan keputusan yang dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik dan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan yaitu Badan Pengawas Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari BPK. Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap

laporan keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau disebut juga Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan terjadi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. pada tahun 2014 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mendapatkan opini penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut H. Abu Bakar selaku Bupati Bandung Barat, opini tersebut diraih kembali karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus lebih ditingkatkan lagi. Terutama, menyangkut penatausahaan aset di beberapa SKPD yang hingga kini masih belum ada titik temunya. Menyadari masih adanya kelemahan dalam pemerintah yang dipimpinnya Abu Bakar menegaskan, akan segera melakukan konsolidasi dan memerintahkan dengan tegas seluruh jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini secepat mungkin. Dia berharap, kedepan Kabupaten Bandung Barat (KBB) bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Fenomena ini melanggar dimensi dari kualitas laporan keuangan yaitu tidak relevan dalam arti tidak tepat waktu karena masalah penatausahaan aset yang belum juga dapat

terselesaikan dan tidak andal. (Agus Yulianto, <http://m.republika.co.id/Diakses> 08/02/2018)

Fenomena selanjutnya juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2015 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Aa Umbara Sutisna menilai bahwa pengelolaan aset merupakan permasalahan utama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selama delapan tahun lebih persoalan aset pelimpahan dari Kabupaten Bandung kepada Kabupaten Bandung Barat tak kunjung dapat diselesaikan. Aa menilai, lemahnya kinerja tiap SKPD selama ini terutama menyangkut persoalan aset menjadi salah satu indikator gagalnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meraih WTP dari BPK RI. Aset yang tersertifikasi masih sedikit dibandingkan dengan aset tanah yang belum tersertifikasi. Padahal Aa mengakui persoalan aset ini sudah bergulir selama 9 tahun lamanya namun penyelesaiannya belum tampak begitu signifikan. Fenomena tersebut melanggar dimensi dari kualitas laporan keuangan yaitu tidak relevan dalam arti tidak tepat waktu karena masalah pengelolaan aset yang tak kunjung dapat terselesaikan, dan tidak lengkap karena masih ada aset yang tersertifikasi masih sedikit serta tidak andal dalam arti tidak dapat diverifikasi karena masih ada aset yang belum tersertifikasi. (Maryam, <http://jabar.pojoksatu.id/Diakses> 02/02/2018)

Fenomena yang terakhir terjadi kembali di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari Badan Pemeriksaan

Keuangan. Penyebab gagalnya Pemkab Bandung Barat meraih opini WTP pada LKPD karena soal pengelolaan aset. Selain itu, masalah lainnya, yaitu pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tingkat SD dan SMP serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemkab Bandung Barat masih memiliki ribuan aset yang belum memiliki sertifikat. Data Badan Keuangan dan Aset Daerah KBB dari 1.444 bidang baru 26 bidang saja yang sudah memiliki sertifikat.

Dengan kondisi tersebut, Menurut Kholid Nurjamil Pemkab diminta untuk meningkatkan terus kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, mereka akan mampu membuat laporan sesuai dengan kegiatan sesungguhnya dan pemkab juga harus memiliki pemahaman terhadap peraturan, sehingga akan ada kepatuhan. Selain itu, pengawasan dan pengendalian internal juga perlu diperhatikan. Fenomena tersebut melanggar dimensi dari kualitas laporan keuangan yaitu tidak relevan dalam arti tidak tepat waktu karena masalah pengelolaan aset yang belum dapat diselesaikan, tidak lengkap karena masih ada aset yang belum memiliki sertifikat dan tidak andal dalam arti tidak dapat diverifikasi karena ada aset yang belum memiliki sertifikat serta penyajian yang tidak jujur karena dalam hal pembuatan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. (Cecep Wijaya Sari 5/6/2017 <http://www.pikiran-rakyat.com/> Diakses tanggal 29 februari 2018)

Kesimpulannya selama ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), masalah setiap tahunnya sama yaitu terkait dengan pengelolaan aset yang tak kunjung dapat diselesaikan. Maka, fenomena tersebut melanggar atau berkaitan dengan dimensi dari variabel dependen (Y) Kualitas Laporan Keuangan yang tidak relevan, tidak andal, tidak dapat dipahami dan tidak dapat diperbandingkan karena masalah penata usahaan aset yang tidak dapat terselesaikan.

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan salah satunya adalah sistem pengendalian internal. Menurut Siti dan Ely (2010:98) Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut:

- a. keandalan pelaporan keuangan,
- b. menjaga kekayaan dan catatan organisasi
- c. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan,
- d. efektifitas dan efisiensi operasi.

Sehingga dengan adanya tujuan sistem pengendalian internal bahwa dapat menjaga keandalan pelaporan keuangan, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena sistem pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan yang benar, melindungi atau membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan penggelapan-penggelapan, kegiatan organisasi dapat dilaksanakan dengan efisien.

Widjajanto (2001: 89) mengatakan bahwa Secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga kualitas dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan juga dapat meningkat.

Berdasarkan kutipan diatas membuktikan bahwa penggunaan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap kecepatan, konsistensi, ketepatan dan kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus sesuai dengan SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010). Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2010: 22-23).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang disajikan pemeriksaan, yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini

Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Desy Sefri, 2014)

Hayyuning Tyas Rosdiani (2011) mengukur pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasilnya bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Hal itu karena dengan pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi dan akan menghasilkan laporan yang benar, dan membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan.

As Syifa Nurillah, (2014) pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut: Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini memberikan informasi bahwa laporan keuangan Pemerintah akan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan juga dapat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan temuan dan fenomena yang telah diuraikan diatas dapat dilihat adanya kontradiksi atau perbedaan antara temuan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian yang mengacu pada penelitian Irwan (2011). Perbedaanya adalah penulis mengganti satu variabel independen, memperluas objek peneltian dan letak lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini menggunakan Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel independen, serta Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pmerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Dinas-dinas di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengendalian Internal pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

2. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
5. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
7. Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
8. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersama sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengendalian Internal pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

8. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersama sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam hal Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat dicapai.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah serta meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana

Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

2 Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai masalah Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah serta meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

3. Bagi Instansi Pendidikan

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang beralamat di Jalan Padalarang – Cisarua km 2 Desa. Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, dan waktu yang diambil adalah bulan April 2018 sampai dengan selesai.